EVALUASI IMPLEMENTASI PEPRES 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

Evaluation Of The Implementation Of Pepres 17 Of 2019 Concerning Government Procurement Of Goods/Service To Accelerate Development In The Yapen Island District, Papua Province

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh :

PRILLIA YUSTIATI URUWAYA, SH
NIM: 2022025015133

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS CENDRAWASIH

JAYAPURA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

EVALUASI IPMLEMENTASI PERPES 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

Evaluation Of The Implementation Of Perpes 17 Of 2019 Concerning Government Procurement Of Goods/Services To Accelerate Development In The Yapen Islands District, Papua Province

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : Juni 2024

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Onesimus Sahuleka S.H.,M.Hum	**Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H**
NIP. 19600127 198902 1 001	**NIP. 19590618 198902 1 001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Marthinus Mambaya,S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, Juni 2024

TIM PENGUJI

Dr. Onesimus Sahuleka S.H.,M.Hum NIP. 19600127 198902 1 001	Ketua	(.....)
Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H NIP. 19590618 198902 1 001	Sekretaris	(.....)
Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A NIP. 19591207 198803 1 001	Anggota	(.....)
Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum NIP. 19600828 199003 1 003	Anggota	(.....)
Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H.,M.Hum NIP. 19590723 198903 1 001	Anggota	(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRILLIA YUSTIATI URUWAYA
NIM : 2022025015133
Judul : Evaluasi Implementasi Pepres 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudiaan hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telag diperolah karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

PRILLIA YUSTIATI URUWAYA
NIM : 2022025015133

ABSTRAK

PRILLIA YUSTIATI URUWAYA. "Evaluasi Implementasi Pepres 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua ". Dibimbing oleh Onesimus Sahuleka sebagai pembingbing I dan Viktor TH. Manengkey sebagai pembing II.

I. Tujuan Penelitian untuk : 1) menganalisa implementasi pepres 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua; dan 2) untuk menganalisa efektifitas hukum dalam pepres 17 tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Yapen. **II. Metode Penelitian ini** menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan metode Deskriptif. Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian ingin mengungkap fakta – fakta dilapangan melalui kata – kata tertulis atau data lisan dari orang – orang, serta perilaku yang dapat di amati yang nantinya di kaitkan dengan teori yang digunakan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara atau penelaan dokumen. Sedangkan desktiptif adalah mengumpulkan data berasal dari kata – kata, gambar dan bukan angka – angka. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
III. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Pelaksaan Peraturan Presiden (Pepres) No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen konsisten dalam memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap pelaku usaha orang asli papua di kabupaten kepulauan yapen. Proses pengadaan barang/jasa dikabupaten kepulauan yapen telah dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang – undang yang termuat dalam peraturan presiden Presiden (Pepres) No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun kesejahteraan pelaku usaha orang asli papua belum Nampak sifnifikan, hal ini dikarenakan pengelolaan menejement administrasi usaha belum dikuasai dengan baik oleh pelaku usaha orang asli papua oleh sebab itu diperlukan pendampingan yang kontinyu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan yapen agar dapat memacu SDM pelaku orang asli papua agar dapat bersaing dengan pelaku usaha orang non papua, selain itu kegiatan pengadaan barang/jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha orang papua standar nilai paket pengadaan barang/jasa belum sesuai bila dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaku usaha orang papua. Implementasi Pelaksaan Peraturan Presiden (Pepres) No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen faktanya belum Nampak signifikan hal ini dikarenakan belum pengdaan barang/jasa yang bersumber dari dana otsus masih dikerjakan pengadaan barang/jasanya oleh pelaku usaha orang non papua selain itu tidak ada sanksi yang tegas dalam peraturan ini untuk mengingat pihak pemerintah daerah yang tidak bersedia menjalan aturan ini oleh sebab itu masih Nampak dengan jelas pihak pemerintah yang salah menggunakan kebijakannya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Kata kunci : Keberpihakan, Otonomi khusus, Percepatan Pembangunan

ABSTRACT

PRILLIA YUSTIATI URUWAYA. "Evaluation of the Implementation of Presidential Decree 17 of 2019 concerning Government Procurement of Goods/Services to Accelerate Development in the Yapen Islands Regency, Papua Province." Supervised by Onesimus Sahuleka as supervisor I and Viktor TH. Manengkey as supervisor II.

Research objectives are to: 1) analyze the implementation of Presidential Decree 17 of 2019 concerning government procurement of goods/services to accelerate development in the Yapen Islands Regency, Papua Province; and 2) to analyze the effectiveness of the law in Presidential Decree 17 of 2019 in Yapen Islands Regency. II. This research method uses qualitative research methods and descriptive methods. The purpose of using a qualitative approach with descriptive methods is because the research wants to reveal facts in the field through written words or oral data from people, as well as behavior that can be observed which will later be linked to the theory used. Qualitative research is carried out by means of observation, interviews or document review. Meanwhile, descriptive is collecting data from words, images and not numbers. This research report will contain data quotations to provide an overview of the presentation of the report.

III. The results of this research found that the implementation of Presidential Regulation (Pepres) no. 17 of 2019 concerning Government Procurement of Goods/Services to Accelerate Development in the Yapen Islands Regency shows that the Regional Government of the Yapen Islands Regency is consistent in providing attention and support for indigenous Papuan business actors in the Yapen Islands Regency. The process of procuring goods/services in the Yapen Islands Regency can be carried out in accordance with the mandate of the law contained in Presidential Regulation (Pepres) No. 17 of 2019 concerning Procurement of Government Goods/Services to Accelerate Development in Yapen Islands Regency. However, the welfare of native Papuan business actors does not appear to be significant, this is because business administration management has not been well mastered by indigenous Papuan business actors, therefore continuous assistance is needed by the regional government of the Yapen Islands Regency in order to stimulate the human resources of indigenous Papuan business actors. in order to be able to compete with

non-Papuan business actors, apart from that, the goods/services procurement activities provided by the regional government to Papuan business actors, the standard value of the goods/services procurement package is not appropriate if it is intended to empower the economic empowerment of Papuan business actors. Implementation of Presidential Regulation (Pepres) no. 17 of 2019 concerning Government Procurement of Goods/Services to Accelerate Development in the Yapen Islands Regency, in fact this does not appear to be significant, this is because the procurement of goods/services sourced from special autonomy funds is still being carried out by non-Papuan business actors. Apart from that, there are no sanctions. which is clear in this regulation to remember that local governments are not willing to implement this rule, therefore it is still clear that the government is wrongly using its policies for the interests of certain groups.

Keywords: Partisanship, Special Autonomy, Acceleration of Development

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tuhan adalah konsultan atas hidup kita,

pena Nya mengukir dan mewarnai tanpa mengurangi

” Waktu Tuhan Pasti yang terbaik ”.

Karya ini saya persembahkan dengan ucapan terimakasih, kepada :

Mama dan Bapa

Yustina Waimbo (Almarhum) dan Menasye Uruwaya

Putri kecil ku yang cintai

Justitia Kresindo D. Atururi

Suami yang kukasihi

Yehud Atururi

Mereka yang berjasa :

- Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II.
- Kakanda ku TONNI Tesar S.SOS beserta keluarga.
- Kakandaku, EDISON MENASE AYOMI , SE beserta Istri Rita Wainggai, S.Pd
- Kakanda ku Fadly Nasrullah bersama keluarga
- Kakanda ku Marinus Manufandu S.Pd beserta keluarga

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Kasih Karunia – Nya kepada Penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program Pasca Sarjana universitas cenderawasih Papua. Tesis ini berjudul " EVALUASI IMPLEMENTASI PEPRES 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROPINSI PAPUA".

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus iklas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw,SE.,M.sc.Agr.,Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih
3. Bapak. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih
4. Bapak Dr, Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Viktor Th Manengkey, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II
6. Rekan – rekan pengurus KAPP Propinsi Papua Se- Tanah Papua
7. Rekan – rekan Pengurus KAPP Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2019 – 2024.

Akhir kata saya berharap semoga segala bantuan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang sepadan dari Tuhan Yang Maha Kuasa

Penulisan tesis ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran maupun komentar untuk menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhannya tesis ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pembangunan di tanah Papua lebih khusus Kabupaten Kepulauan Yapen.

Jayapura, 26 Juni 2024

Penulis,

PRILLIA YUSTIATI URUWAYA

NIM : 2022025015133

DAFTAR ISI :

HALAMAN JUDUL …… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …… ii

PELAKSANAAN UJIAN …….. iii

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT/KEASLIAN TESIS …… iv

ABSTRAK …….. v

ABSTRAKCT ……. vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN …….. vii

KATA PENGANTAR …… viii

DAFTAR ISI ……... ix

BAB. I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG 1

RUMUSAN MASALAH 9

TUJUAN PENELITIAN 9

MANFAAT PENELITIAN 10

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI 11

2.1.TEORI EVALUASI KEBIJAKAN 12

2.2.TEORI EFEKTIVITAS HUKUM 19

2.3.EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN DALAM HIRARKI TATA PERUNDANGAN – UNDANGAN DI INDONESIA 37

2.4.OTONOMI KHUSUS PAPUA..... 62

2.5.KERANGKA BERPIKIR 73

BAB. III. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN ..... …… 76
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN ..... ……. 77
C. FOKUS PENELITIAN ..... ……. 77
D. JENIS DAN SUMBER DATA ……...… 78
E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA……..... 79
F. TEHNIK ANALISIS DATA……...……. 80

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……..…… 84

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN ……..... 96
B. SARAN – SARAN……. 97

DAFTAR PUSTAKA ..... ……. 99